

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Tap. MPR No II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam bagian pembangunan bidang pendidikan, disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. (Tap. MPR RI No. II/MPR/1993, 1993 : 95)

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. (Undang Undang No. 2/1989, 1989 : 4)

Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka adalah kewajiban seluruh bangsa Indonesia khususnya lembaga pendidikan untuk dapat menjalankan peranannya dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional dimaksud. Perlu juga disadari oleh para pimpinan lembaga pendidikan di mana dewasa ini arus globalisasi, informasi dan teknologi terus berkembang pesat dan jika tidak diimbangi dengan kualitas manusianya bukan mustahil bangsa ini akan diseret sendiri oleh kemajuan teknologi tersebut.

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai mitra Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seperti diamanahkan oleh GBHN, harus dapat memberikan sumbangannya bagi peningkatan kualitas peserta didik yang di kemudian hari akan mengisi kemerdekaan dan meneruskan perjuangan melalui upaya-upaya pembangunan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Untuk itu perlu diadakan langkah-langkah bagi pembaharuan sistem pengelolaan lembaga pendidikan baik dari sudut personil, sarana dan prasarana maupun dalam peng operasiannya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta didik dan masyarakat bagi kepentingan pembangunan.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa, berbagai langkah telah dan sedang dilakukan, sebagai penanganan yang secara umum telah menampakkan keberhasilan bagi peningkatan kualitas peserta didik, namun kita tidak boleh merasa puas dengan keberhasilan tersebut karena sesuai dengan perkembangan dan kemajuan jaman, sistem dan cara yang telah dan sedang dilakukan itu boleh jadi akan ketinggalan dalam mengimbangnya.

Sebagai upaya bagi peningkatan kualitas Perguruan Tinggi pada umumnya, khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di antaranya dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Ujian Negara Cicilan (UNC). UNC memberikan andil yang cukup besar bagi peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta, karena dengan UNC seorang mahasiswa harus mempersiapkan diri yang sesuai dengan kemampuannya dengan belajar sungguh-sungguh untuk menghadapinya. Hal ini sesuai dengan petuah lama orang-orang tua kita yang berbunyi : "hapal kaji karena diulang, pandai meniti karena dilalui". Demikian juga

halnya dengan persyaratan yang harus dipenuhi, baik ditinjau dari sudut persiapan mahasiswa maupun kualifikasi dosen yang mengevaluasi, dari mulai pembuatan soal sampai dengan penilaian ujian tersebut, di samping penyelenggaraannya diawasi oleh Kopertis Wilayah yang akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas mahasiswa peserta ujian. Untuk keperluan itu perlu didukung oleh administrasi yang baik, sistem yang baik serta personil-personil yang profesional.

Namun demikian sesuai dengan penyelenggaraan UNC di FKIP Universitas Muslim Nusantara, bahwa masih ditemukan beberapa kendala antara lain ; *(1) alur administrasi yang kurang jelas dan konsisten, (2) kualifikasi peserta ujian yang belum jelas dan konsisten serta kualifikasi dosen penguji ujian negara yang belum profesional (3) sistem atau mekanisme penyelenggaraan ujian negara yang belum mantap.*

Kendala di atas dapat diatasi apabila ada upaya perbaikan kualitas kemampuan managerial dan kemampuan intelektual personil yang mampu memberi pelayanan administrasi, sehingga penyelenggaraan UNC dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan UNC sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem antara lain; personil sebagai sumberdaya manusia, fasilitas yang berupa sarana dan prasarana, peraturan-peraturan dan kebijakan, sumber belajar dan lingkungan. Keseluruhan sub sistem dimaksud harus merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh guna dapat memenuhi fungsinya masing-masing *sebagai sistem terpadu*, karena dengan tidak berfungsinya salah satu atau beberapa sub sistem tersebut apa yang menjadi sasaran atau tujuan organisasi tidak akan terwujud.

Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu dewasa ini diakui sebagai suatu konsep yang berorientasi pada seluruh aspek dalam organisasi termasuk organisasi pendidikan dengan selalu mengadakan perbaikan secara berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan definisi berikut ini: Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya (Tjiptono, 1996:4)

Menurut Hensler dan Brunell (dalam Scheuing dan Christoper) yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (1996 : 14), ada empat prinsip utama dalam TQM, yaitu:(1) Kepuasan pelanggan, (2) Respek terhadap setiap orang, (3) Manajemen berdasarkan fakta, dan (4) Perbaikan berkesinambungan.

Pada bagian lain dikemukakan, bahwa TQM mencakup dua komponen, yakni apa dan bagaimana menjalankan TQM, namun yang mendapat penekanan pendekatan TQM dalam menjalankan usaha adalah komponen bagaimana menjalankan TQM tersebut. Komponen ini menurut Goetsh dan Davis memiliki 10 (sepuluh) unsur utama adalah:

1. Fokus pada Pelanggan
2. Obsesi terhadap Kualitas
3. Pendekatan Ilmiah
4. Komitmen Jangka Panjang
5. Kerja Sama Tim (team work)
6. Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan
7. Pendidikan dan Latihan
8. Kebebasan yang Terkendali
9. Kesatuan Tujuan
10. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan.

Penyelenggaraan UNC dapat berlangsung dengan efektif di mana diperlukan TQM dalam penyelenggaraan ujian negara. Untuk itu diperlukan administrasi yang handal. Hal ini sesuai dengan rumusan yang dikemukakan oleh Schuler (1993) sebagai berikut:

How effectively an organization's human resources are managed depend in large part upon the quality of the people in the PHRM departement.

The PHRM Manager. *PHRM managers needs to be effective. They must be able to identify problems, developed alternative solution, and then select and implement the most effective one. In addition, they must develop and maintain an integrated and effective management information system to help identify problems and implement policy. They must be innovative, aggressive, and willing to take the risk incurred by serving as the organization's conscience. Furthermore, they must be effective at selecting, building, and developing an entire personnel staff to carry out the five PHRM fuctions. (Schuler, 1993 : 36)*

Berdasarkan pendapat di atas, diharapkan seorang manajer mempunyai kemampuan mengidentifikasi permasalahan, menentukan solusi untuk pengembangan alternatif, dan mengadakan seleksi serta mengimplementasikan salah satu alternatif solusi yang terbaik. Dengan demikian diperlukan sistem informasi manajemen untuk membantu mengidentifikasi masalah kebijakan dan pengimplementasiannya. Lebih dari itu harus efektif dalam penseleksian, pembangunan dan pengembangan demi terlaksananya fungsi-fungsi PHRM (Personnel Human Resources Management).

Adapun fungsi PHRM dimaksud menurut Schuler adalah sebagai berikut:

1. *Planning for human resources needs*
 2. *Staffing the organization's personnel needs*
 3. *Appraising and compensating employee behavior*
 4. *Improving employees and the work environment*
 5. *Establishing and maintaining effective working relationship*
- (Schuler, 1993 : 6)

Harus diakui bahwa perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan kepegawaian dalam suatu stratifikasi, penilaian dan kompensasi tenaga kerja, perbaikan, penentuan dan pemeliharaan hubungan kerja yang efektif merupakan hal-hal yang harus ditumbuh suburkan dalam suatu organisasi. Karena dengan melaksanakan fungsi-fungsi di atas tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya akan dapat tercapai.

Administrator yang handal adalah benar-benar menguasai berbagai kemampuan managerial. Hal ini sesuai dengan pendapat Coombs (1969) sebagai berikut:

Any productive system, whatever its aim and technology, requires management. It must have leadership and direction, supervision and coordination, constant evaluation and adjustment. In the case of an educational system, as we said much earlier when we analogized it to agriculture, its problem of management are extraordinarily, partly because its over all size is divided into many small and scattered parts. A host of organization and people have a hand in managing at lest some aspects of an educational system. They include government agencies at all levels. churches and other private bodies, politicians and civils servants, administrative heads of universities and local schools, professors and teachers, students and parents, and endless critics of very stripe. Here, however, we are less concerned with the forgoing people than with the management milleu within wich they function. The issue for use is not the individual ability and moral worth of education administrators, their devotion to duty, or their taste for hard work. These are often of a very high order. The issue instead is wether the basic managerial arrangement of education systems are adequate to the tasks before them. (Coombs, 1969 : 119-120)

Pada bagian lain Coombs (1969) menyebutkan, bahwa pimpinan suatu perguruan tinggi sebaiknya dipegang oleh seorang yang benar-benar ahli dalam mengelola lembaga yang dipimpinnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakannya berikut ini:

At the university level in many countries, the top manager is a professor, elected by the faculty, usually to serve for a limited time and then get back to teaching. The last thing he is expected to do is manage the institution. If he tried, the result might be disastrous. This inbreeding process at whatever level, cuts the educational system off from potential sources of creative leadership, executive talent, innovators, and specialist represented by able people who did not decide at an early point in their lives to become teachers, but who may turn out to be well suited to help manage school systems. (Coombs, 1969 : 122)

Panitia UNC sebagai tim yang berperan terhadap mutu lulusan pendidikan, dalam pelaksanaan tugasnya seyogianya efektif sehingga proses pelayanan dan produknya berkualitas. Tim ini mempunyai visi jauh ke depan, memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, berusaha meningkatkan kualitas layanan, mendefinisikan peranan para anggotanya secara jelas, memiliki sumber-sumber untuk beroperasi, mengetahui tanggung jawab dan batas-batas kewenangannya, merencanakan pekerjaannya, menggunakan alat-alat yang cocok untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki struktur yang jelas dan membangun perilaku tim kerja yang bermanfaat.

UNC sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan dan sekaligus sebagai pengendali mutu PTS, kiranya perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraannya. Bila hal ini diabaikan, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis menarik tema sentral atau fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah penyelenggaraan UNC dengan manajemen pendidikan yang profesional, yaitu baik sistem ataupun personil yang kompeten telah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan lulusan PTS?

Berdasarkan fokus masalah di atas secara sadar harus diakui, bahwa manajemen UNC sebagai bagian dari proses belajar-mengajar di PTS masih belum sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam hal mutu pelayanannya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahui (1) bagaimana perencanaan pengorganisasian dan pengorganisasian tentang penyelenggaraan UNC? (2) bagaimana layanan panitia UNC terhadap tugas yang diembannya? (3) bagaimana profil hubungan antara manajemen UNC dengan efektivitas penyelenggaraan UNC?

Dengan mengetahui keadaan di atas, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para administrator bagi kelancaran program-program pendidikan yang bermutu, produktif dan profesional. Selanjutnya keadaan tersebut dapat dijadikan dasar bagi administrator dalam *me-manage* kepanitiaan UNC agar dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi kelancaran penyelenggaraan UNC.

Sebaliknya apabila tantangan sebagaimana telah penulis rumuskan dalam fokus masalah tidak diambil langkah-langkah penanganannya, bukan mustahil penyelenggaraan UNC yang dalam tujuannya adalah sebagai pengendali mutu lulusan PTS hanya merupakan penghamburan waktu, tenaga dan dana belaka. Bahkan lebih dari itu, jika tantangan itu dibiarkan berlarut-larut bukan mustahil UNC akan dijadikan sebagai ajang bisnis oleh personil-personil yang tidak bertanggung jawab dan sekaligus akan menghantui mahasiswa sebagai peserta UNC. Dengan demikian tujuan pendidikan nasional seperti dituangkan dalam GBHN meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak akan dapat terwujud.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang handal untuk dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan UNC di masa yang akan datang, sehingga penelitian tentang efektivitas penyelenggaraan ujian negara pada PTS dan segala kendala yang menyertainya perlu diambil langkah pemecahannya.

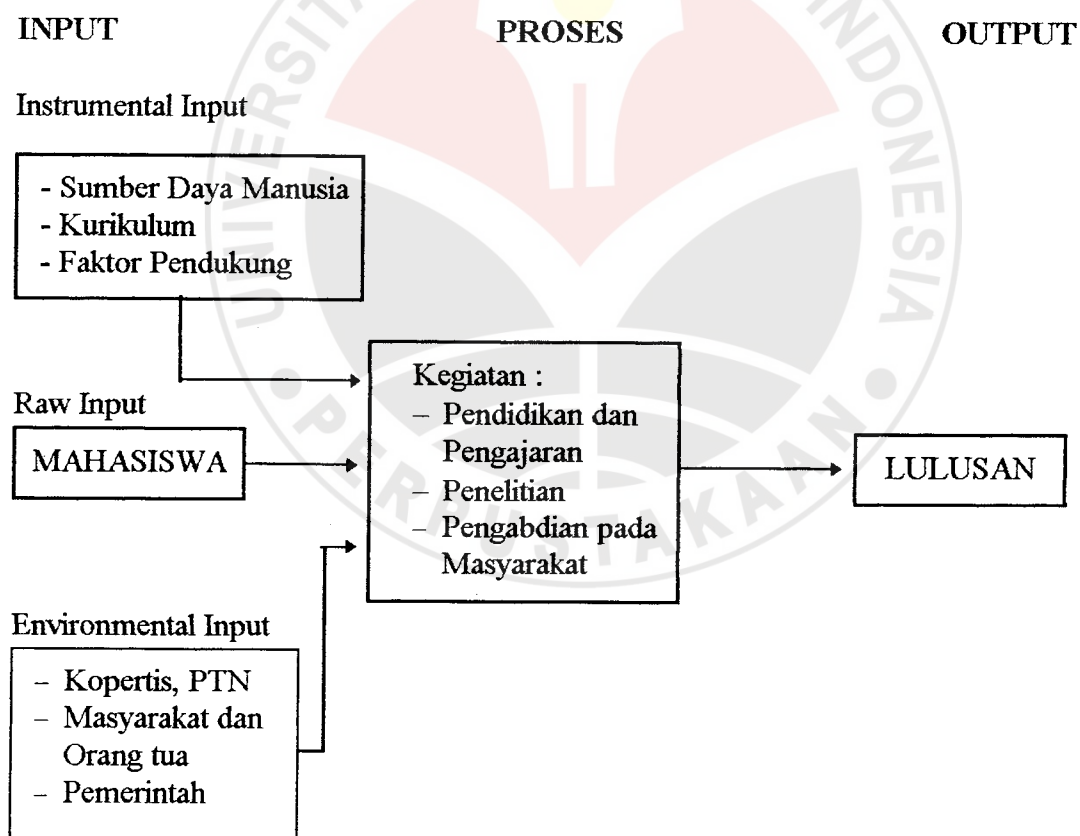
B. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah

Produktivitas suatu lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dapat dilihat dari sekurang-kurangnya dua kriteria yaitu (1) dari sudut masa penyelesaian studi dan (2) sebagai mekanisme proses pengendalian mutu kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta. Masa penyelesaian studi bukan hanya berkenaan dengan banyaknya lulusan dari setiap program, tetapi juga dilihat dari ketepatan waktu penyelesaiannya pada program-program tersebut. Kualitas lulusan berkenaan dengan kualitas kemampuan akademik dan/atau kemampuan profesional serta karakteristik kepribadian para lulusan. Keduanya sangat dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan. Efektivitas berkenaan dengan performansi sistem penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai hasil atau output yang paling tinggi, sedangkan efisiensi berkenaan dengan pemakaian sumber-sumber atau input yang terbatas dalam waktu yang telah ditentukan.

Sebagai suatu sistem, pendidikan pada perguruan tinggi memiliki tiga komponen utama yang saling terjalin, yaitu komponen input, proses dan output. Pencapaian output tidaklah semata-mata ditentukan oleh mahasiswa sebagai input tetapi juga ditentukan oleh prosesnya, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau proses akademik yang melibatkan dua komponen pendukung

berupa masukan instrumental dan masukan lingkungan. Masukan instrumental mencakup unsur-unsur; a) sumber daya manusia atau personil yang terdiri atas pimpinan, dosen (tenaga pengajar), tenaga administrasi dan tenaga teknis, b) kurikulum, c) faktor pendukung (sarana dan fasilitas pendidikan) yang meliputi bangunan, alat-alat kantor dan peralatan pendidikan lainnya. Masukan lingkungan berasal dari pihak Kopertis, Pemerintah Daerah, Orangtua mahasiswa dan masyarakat. Unsur-unsur tersebut diolah melalui suatu sistem administrasi perguruan tinggi agar mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

HUBUNGAN ANTARA INPUT, PROSES DAN OUTPUT



GAMBAR 1
Pendidikan di PTS Sebagai Suatu Sistem

(Erliany Syaodih, Tesis: 1993)

Mahasiswa sebagai *raw input* seyogianya ditempa dengan baik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan tetap mengindahkan wawasan almamater serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.

Pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan utama lembaga pendidikan, karena langsung berkenaan dengan proses pendidikan yang akan menghasilkan para lulusan. Pelaksanaan kegiatan akademik membutuhkan pemberdayaan manajemen akademis yang mantap agar berjalan secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan ujian negara pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan kegiatan akademik yang melibatkan banyak unsur baik dari pihak PTS sendiri maupun dari pihak Kopertis sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi swasta di wilayahnya.

Ujian negara dilaksanakan sesuai dengan program yang telah digariskan yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tertentu. Pelaksanaan ujian negara *ditawarkan kepada peserta ujian secara tersebar selama masa studi pada setiap akhir semester* tahun berjalan.

Mengingat demikian kompleks pelaksanaan akademik di PTS, khususnya penyelenggaraan UNC, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: **Bagaimana efektivitas manajemen UNC ditinjau dari sistem penyelenggaraannya mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan lulusan PTS?**

Dari rumusan masalah di atas penulis menjabarkannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelenggaraan UNC ditinjau dari pemberdayaan kepanitiaan ujian negara?
2. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan UNC ditinjau dari upaya mengoptimalkan fasilitas administrasi melalui pemberdayaan manajemen akademis?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam proses penyelenggaraan UNC?
4. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan UNC?

C. Tujuan Penelitian dan Keluaran yang Diharapkan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi empirik tentang efektivitas penyelenggaraan ujian negara pada FKIP UMN . Hasil yang diharapkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem penyelenggaraan ujian negara pada FKIP UMN pada masa yang akan datang.

Sedangkan secara khusus ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui proses penyelenggaraan UNC ditinjau dari sudut pemberdayaan manajemen kepanitiaan ujian negara.
2. Mengetahui mekanisme penyelenggaraan UNC negara ditinjau dari upaya mengoptimalkan fasilitas administrasi melalui pemberdayaan manajemen akademis.

3. Menemukan faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam proses penyelenggaraan UNC.
4. Mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan UNC.

D. Manfaat Penelitian

Dari temuan-temuan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat dikemukakan berupa saran atau rekomendasi kepada berbagai pihak, yakni:

1. Bagi Universitas Muslim Nusantara . Bahwa temuan hasil penelitian ini akan menjadi masukan bagi pimpinan Universitas Muslim Nusantara yang kekuatan dan kelemahan serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan ujian negara cicilan. Masukan dimaksud akan dijadikan sebagai bahan bagi peningkatan pelayanan, termasuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan ujian negara cicilan tersebut.
2. Bagi Kopertis dan PTS lain. Temuan hasil penelitian ini dapat menjadi contoh tentang penyelenggaraan ujian negara cicilan serta permasalahan yang dihadapi oleh PTS dan sekaligus bahan pembinaan bagi Kopertis.
3. Bagi para peneliti. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lanjutan.
4. Bagi pengembangan ilmu. Di samping manfaat praktis, temuan-temuan hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pengembangan teori.

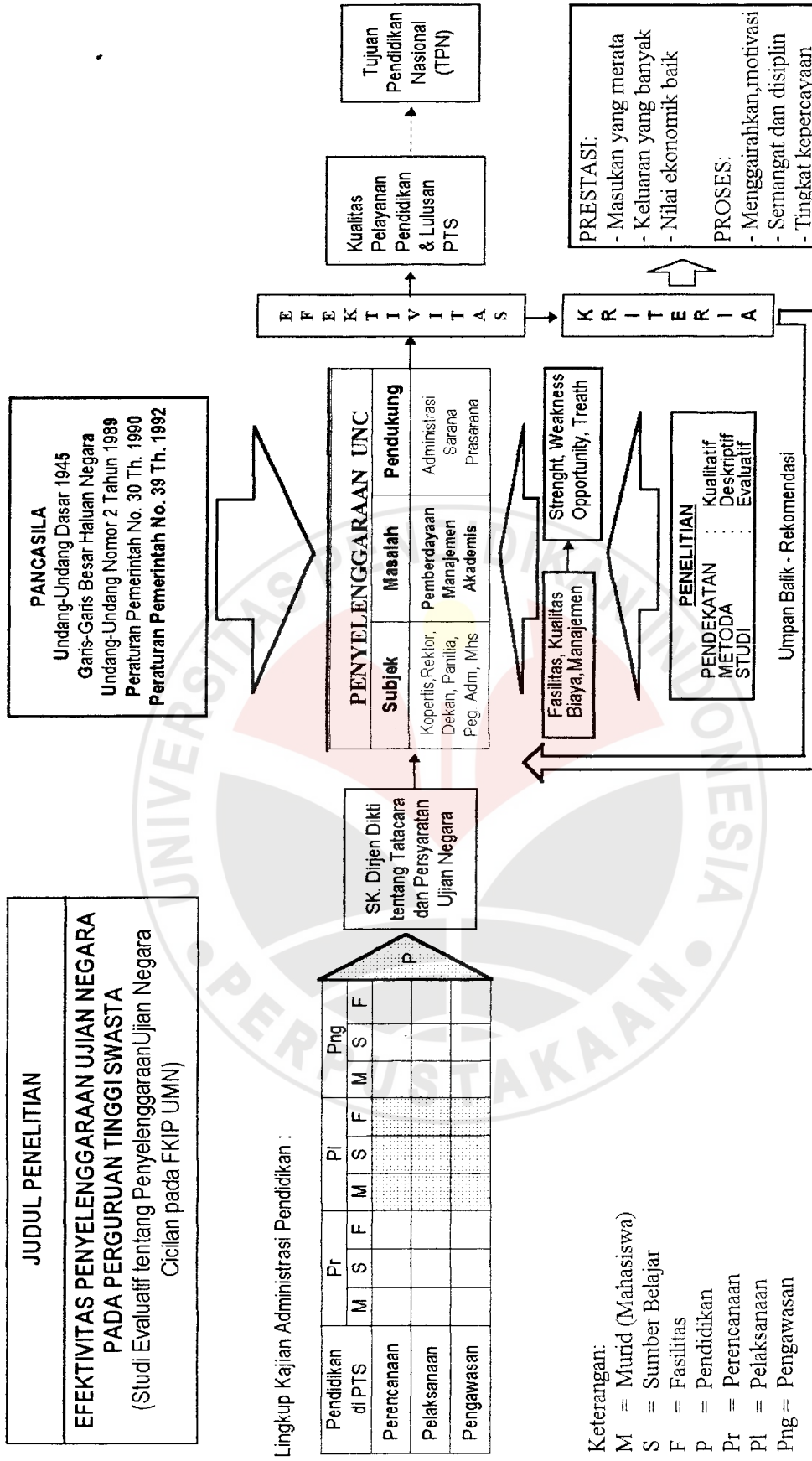
E. Kerangka Berpikir dan Pola Penelitian

Penyelenggaraan UNC sebagai kajian administrasi pendidikan harus direncanakan dengan baik, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan memudahkan penilaian dan pengawasan. UNC didasari SK.Dirjen Dikti No.421/Kep/1996 tentang tata cara dan persyaratan ujian negara. Kopertis berkewajiban membina PTS, di samping Rektor sebagai penanggung jawab dan Dekan ujung tombak terselenggaranya UNC dengan baik. Panitia UNC dan pegawai administrasi harus melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga peserta UNC menempuh ujian dengan aman. UNC merupakan bagian pemberdayaan manajemen akademis harus dikelola dengan baik. Demikian juga perangkat administrasi sebagai penunjang di samping sarana dan prasarana juga harus ditata, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Dengan mempedomani rencana, penyelenggaraan UNC diharapkan melahirkan tingkat efektivitas yang tinggi ditandai dengan kualitas pelayanan yang baik dan lulusan banyak dan bermutu pula.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dalam Moleong 1995:3), metoda deskriptif bermaksud mengungkap kenyataan yang ada pada saat dilakukan penelitian dan studi evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan UNC, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan atau sumbangan bagi mekanisme penyelenggaraan UNC demi terciptanya pelayanan dan pendidikan PTS yang berkualitas baik pada masa yang akan datang.

KERANGKA BERPIKIR DAN POLA PENELITIAN



Gambar 2. Kerangka Pikir dan Pola Penelitian

Keterangan:
 M = Murid (Mahasiswa)
 S = Sumber Belajar
 F = Fasilitas
 P = Pendidikan
 Pr = Perencanaan
 Pl = Pelaksanaan
 Png = Pengawasan